



Website:

ejournal.umm.ac.id/index.php/janayu

Afiliasi:

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Malang,
Malang, Indonesia

***Correspondence:**

setyawansetu@gmail.com

DOI: [10.22219/janayu.v1i1.11186](https://doi.org/10.22219/janayu.v1i1.11186)

Sitasi:

Setyawan & Juanda. (2020).
Manajemen Pengelolaan Anggaran
Keuangan dan Aset SD
Muhammadiyah 08 dan SMP 06 Dau.
*Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu
Masyarakat*, 1(1), 18-31.

Proses Artikel

Diajukan:

02 Februari 2020

Direviu:

10 Februari 2020

Direvisi:

24 Maret 2020

Diterima:

25 Maret 2020

Diterbitkan:

10 April 2020

Alamat Kantor:

Jurusan Akuntansi Universitas
Muhammadiyah Malang
Gedung Kuliah Bersama 2
Lantai 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, Jawa Timur,
Indonesia

P-ISSN: 2721-0421

E-ISSN: 2721-0340

Tipe Artikel: Paper Pengabdian

Manajemen Pengelolaan Anggaran Keuangan dan Aset SD Muhammadiyah 08 dan SMP 06 Dau Setu Setyawan^{1*} dan Ahmad Juanda¹

ABSTRACT

So far, SD Muhammadiyah 08 and SMP Muhammadiyah 06 Dau have not been maximized in reporting financial management, especially reporting fixed assets that are managed. The purpose of this program is to explore the potential sources of potential funds and then prepare a budget that is able to measure the level of performance in certain periods. While the assistance is carried out to create an accountable financial management system using the principles of Good Governance (good financial governance). The method used in the service program using the RAD (Rapid Application Development) method. The results of the training on Management of Financial and Asset Budget Management were very satisfying. This was shown by the results of the pre-test of 12 participants 4 people with a value of 25, 3 participants with a value of 50, 3 participants with a value of 60 and the remaining 2 participants received a value of 70. After being given the concept of the budget and performance-based training is then performed post-test the average value of participants in 80.

KEYWORDS: Asset management; financial management; RAD methods

ABSTRAK

Sejauh ini, SD Muhammadiyah 08 dan SMP Muhammadiyah 06 Dau belum dimaksimalkan dalam pelaporan manajemen keuangan, terutama pelaporan aset tetap yang dikelola. Tujuan dari program ini adalah untuk mengeksplorasi sumber-sumber potensial dari dana potensial dan kemudian menyiapkan anggaran yang mampu mengukur tingkat kinerja dalam periode tertentu. Sedangkan bantuan dilakukan untuk menciptakan sistem manajemen keuangan yang akuntabel menggunakan prinsip-prinsip Good Governance (tata kelola keuangan yang baik). Metode yang digunakan dalam program layanan menggunakan metode RAD (*Rapid Application Development*). Hasil pelatihan Manajemen Keuangan dan Manajemen Anggaran Aset sangat memuaskan. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pre-test dari 12 peserta 4 orang dengan nilai 25, 3 peserta dengan nilai 50, 3 peserta dengan nilai 60 dan sisanya 2 peserta mendapat nilai 70. Setelah menjadi mengingat konsep anggaran dan pelatihan berbasis kinerja ini kemudian dilakukan post-test nilai rata-rata peserta di 80.

KATA KUNCI: bisnis; dana; independen

PENDAHULUAN

19

Saat ini Persyarikatan Muhammadiyah Daerah Malang, mengelola amal usaha dalam bidang pendidikan sekolah dasar (SD) sebanyak 7 dan 9 sekolah Tingkat Pertama (SMP), Dari jumlah tersebut yang mempunyai Menejemen Menejemen Pengelolaan Anggaran Keuangan dan Aset dan pengelolaan keuangan yang baik hanya beberapa sekolah, pada sekolah dasar Muhammadiyah dan SMP Muhammadiyah Dau. Rata rata sekolah dasar dan menengah belum memahami anggaran berbasis kinerja, anggaran yang dibuat selama ini lebih pada jumlah penerimaan dengan berapa jumlah pengeluaran, demikian juga dalam hal pengelolaan keuangan masih belum mengacu pada prinsip-prinsip good governance (tata kelola yang baik) yaitu berbasis pada transparansi dan akuntabilitas (Arifiyanto & Kurrohman, 2014; Makalalag, Nangoi, & Karamoy, 2017).

Transparansi dan akuntabilitas sebagai kewajiban agen mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*) (Hanifah & Praptoyo, 2015). Pada konteks sekolah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi setiap aktivitas dan kinerja sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik sekolah adalah pemberian informasi kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), yaitu murid, orang tua wali, komite sekolah, dewan sekolah, dll. Maka, akuntabilitas publik sekolah adalah kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh sekolah dari penggunaan sumber-sumber daya sekolah yang berasal dari *stakeholders* yang dipercayakan kepada sekolah (Pratiwi & Hanafi, 2016; Utama & Setiyani, 2014).

Institusi pendidikan, sebagai organisasi sektor publik, juga dituntut untuk memberikan laporan akuntabilitas kepada *stakeholders*. Dasar regulasi akuntabilitas (Hifni, Sayudi, & Hayat, 2019) ini termaktub secara implisit dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 46-47 dan 54. Akuntabilitas pendidikan secara umum dibagi menjadi 2 yaitu akuntabilitas pengelolaan dana dan akuntabilitas pengelolaan program (manajemen) pendidikan. Akuntabilitas dana yang termaktub dalam pasal 46 menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pada pasal 47 dijelaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Kedua pasal tersebut secara tegas menuntut dan mendorong pengelola sekolah untuk menerapkan prinsip dan asas akuntabilitas dalam mengelola dan melaporkan dana dan sumber daya yang dikuasainya. Disamping itu, setiap sekolah juga dituntut untuk mengelola dananya berdasarkan pada dasar dan prinsip anggaran berbasis kinerja (Shafratunnisa, 2016; Yuliani & Susanto, 2016).

Anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*) pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja (Friska, 2015). Anggaran kinerja menghubungkan tiap pengeluaran dengan hasil (*output* dan *outcome*) yang diinginkan (Halidayati, 2014; Nanda & Darwanis, 2016). Salah satu reformasi pengelolaan sumber daya keuangan yang baik adalah adanya digunakannya anggaran berbasis kinerja yang menggantikan model konvensional yang menitikberatkan pada target dan realisasi (Saragih, 2012) . Pada konteks anggaran kinerja, setiap unit harus menetapkan target keluaran (*output* dan *outcome*) dan indikator kinerja yang akan dicapai dari masing-masing program kerja dan kegiatan (Nanda & Darwanis, 2016; Verasvera, 2016). Berdasarkan keluaran dan indikator kinerja tersebut, maka dapat disusun anggaran pengelolaan dananya. Dasar anggaran tersebut mendorong alokasi dan penggunaan dana

Janayu

1.1

secara efektif dan efisien. Sehingga, setiap alokasi dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

SMP 06 dan SD 08 Muhammadiyah Dau belum optimal dalam mengelola anggaran keuangan sekolah, hasil dari survei yang telah dilakukan selama 3 hari ditemukan pokok persoalan, yaitu pertama Penyusunan anggaran masih berbasis anggaran tradisional yang menekankan pada sisi pendapatan dan sisi pengeluaran belum berbasis pada anggaran kinerja yang melihat dari ukuran keberhasilan anggaran. Kedua, sistem pencatatan dan pelaporan masih menggunakan buku manual, akibat informasi keuangan yang dibutuhkan tidak bisa disajikan dengan cepat dan Keempat belum melaporkan jumlah aset secara sistematis dalam bentuk neraca.

Permasalahan saat ini adalah mitra belum bisa memahami dan menyusun anggaran yang berbasis kinerja, selama ini anggaran sebatas pada target dan realisasi, sehingga belum menjamin Pengelolaan Anggaran belum dijadikan alat ukur dan control atas pengelolaan Keuangan dan Aset. *Stake holder* (komite sekolah, persyarikatan dan pemerintah) mengharapkan dana dikelola oleh pihak sekolah harus sesuai dengan fungsi dan tujuannya, dilaporkan secara akuntabel dan capaian kinerja dapat diukur hasilnya.

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan diskusi dengan beberapa kepala sekolah SD & SMP Muhammadiyah di wilayah kab. Malang, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. pengelolaan anggaran yang disusun selama ini hanya berbasis pada terget dan realiasi atas sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran, belum sampai pada indikator capaian hasil yang diinginkan oleh stake holder.
- b. Sistem pengelolaan keuangan belum memenuhi kaidah kaidah *good governance* yaitu akuntabel dan transparan atas informasi aset, kewajiban dan sistem pengelolaan keuangan.

METODE

Metode yang digunakan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan di atas dapat Metode kegiatan program ipteks bagi masyarakat ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu :

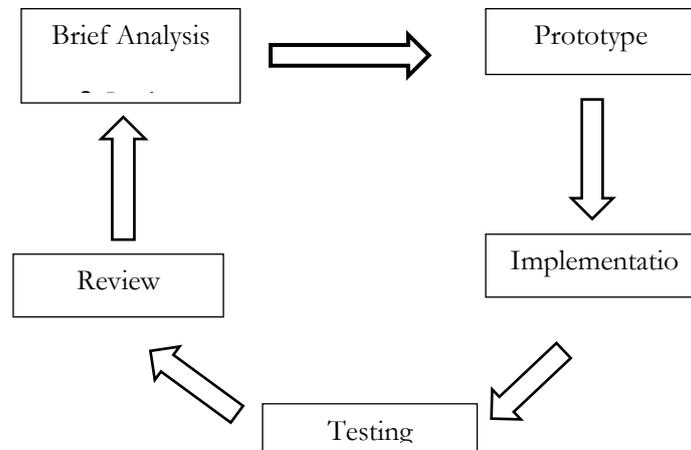
Metode PRA (*Participatory Rapid Appraisal*)

Metode RAD (*Rapid Application Development*) merupakan pengembangan sistem yang mengutamakan kecepatan pengembangan melalui keterlibatan user atau Pengguna dalam penggunaan suatu rangkaian sistem, dimana rangkaian tersebut berfungsi untuk suatu model (*prototype*) sistem yang lebih efektif. RAD melibatkan user atau pengguna pada proses desain sehingga kebutuhan user dapat terpenuhi dengan baik dan secara otomatis kepuasan user sebagai pengguna sistem semakin meningkat. RAD melibatkan user dalam proses testing sehingga dapat memangkas proses pembangunan yang panjang untuk dapat *deliver on schedule*. Metode RAD (*Rapid Application Development*) yang akan digunakan dijelaskan dengan detail seperti Gambar 1.

Metode ceramah dimaksudkan untuk menyampaikan informasi untuk materi yang bersifat umum dan teoritis, dalam hal ini strategi penyusunan anggaran berbasis kinerja dan pengenalan teknologi komputer dalam program excel untuk mendukung penyusunan anggaran dan sistem pengelolaan keuangan.

Metode Pelatihan dimaksudkan untuk menanamkan kecakapan dan keterampilan teknis dan praktis dalam Menejemen Pengelolaan Anggaran Keuangan dan Aset SD Muhammadiyah 08 Dan SMP 06 Dau. Dengan diadakan pelatihan kepala sekolah dan kepada bendahara

sekolah sekolah mampu mengelola keuangan dengan sistim informasi keuangan yang baik dan akuntabel.



Gambar 1.
Alur Metode
PRA
(Participatory
Rapid
Appraissal)

Tahapan Pelaksanaan Program Pengabdian.

Sebelum aktivitas pelatihan dilakukan kepada kelompok sasaran, lebih dahulu dilakukan pre-tes untuk mengehauai kemampuan tentang konsep dasar penyusunan anggaran sekolah, konsep dasar penyusunan pelaporan keuangan, penguasaan Microsoft offices khususnya MS Excel.

Pelatihan Penyusunan Penganggaran sekolah berbasis kinerja dimulai dengan pemahaman tentang, Penggalian sumber-sumber pendapatan sekolah (Komariah, 2018; Muhaimin, 2015), Perencanaan pembuatan program dengan basis kegiatan yang terukur, Kegiatan penilaian atau ukuran tingkat keberhasilan program, Evaluasi untuk kemungkinan ada perubahan anggaran, dan Pengawaasan dalam proses pelaksanaan anggaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Workshop Menejemen Pengelolaan Anggaran Keuangan berbasis Kinerja

Paradigma Perencanaan Dan Pengendalian Keuangan Sekolah. perlu mperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Transparan berarti adanya keterbukaan. transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumberr keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah (Coryanata, 2016). Di samping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat,

orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah, (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga (Rahmah, 2016). *Effectiveness "characterized by qualitative outcomes"*. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. *Efficiency "characterized by quantitative outputs"*. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal yaitu waktu, biaya dan tenaga.

Pelatihan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.

Dalam menyusun anggaran kinerja tahap pertama menetapkan strategi organisasi (visi dan misi). Visi dan misi merupakan cara pandang jauh kedepan dan memberikan gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh suatu organisasi. Visi dan misi organisasi harus dapat mencerminkan apa yang ingin dicapai; memverifikasi arah dan fokus strategi yang jelas; menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis; memiliki orientasi masa depan; menumbuhkan seluruh unsur organisasi; menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Langkah berikutnya Pembuatan Tujuan. Tujuan yang dimaksud dalam hal ini adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun atau tujuan operasional. Tujuan operasional harus memiliki beberapa karakteristik seperti:

- a. Harus mempresentasikan hasil akhir (true ends/ outcome) bukannya keluaran (output);

- b. Harus dapat diukur dalam jangka pendek agar dapat dilakukan tindakan koreksi (corrective action);
- c. Harus dapat diukur menentukan apakah hasil akhir (outcome) yang diharapkan telah dicapai;
- d. Harus tepat, artinya tujuan tersebut memberikan peluang kecil untuk menimbulkan interpretasi individu.

Langkah berikutnya Penetapan aktivitas atau program. Dimana Aktivitas harus dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional. mengevaluasi dan pengambilan keputusan. Proses ini dapat dilakukan dengan standar baku yang ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan kebebasan pada masing-masing unit untuk membuat kriteria dalam menentukan peringkat. Prinsip-prinsip Anggaran Berbasis Kinerja dalam hal ini penyusunan anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikannya prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Menurut Halim (2015) prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja, yaitu:

- a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

- b. Disiplin Anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/ pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Menejemen Pengelolaan Anggaran Keuangan dan Aset pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/ proyek yang belum/ tidak tersedia anggarannya.

- c. Keadilan Anggaran

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena daerah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan.

- d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat di pertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan stakeholders.

- e. Disusun dengan Pendekatan Kinerja

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya penampilan hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang

telah ditetapkan, selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait.

FGD Penggalian Dana (fund Raising)., Rencana Anggaran Kerja, Transparansi dan akuntabilitas, Menejemen Aset. Forum diskusi yang dilakukan peserta dengan pendamping dengan prosedur sebagai berikut :

a. Peserta di beri Form Penggalian. Pendanaan

Form penggalian pendanaan dikelompokkan yang bersumber dari peserta didik dan Pendanaan dari eksternal (Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan lembaga lainnya) bentuk Form ini digunakan untuk menggali program yang direncanakann peserta jumlah satuan dan jumlah pendanaan. form sebagai berikut :

RENCANA KERJA ANGGARAN PENDAPATAN SEKOLAH			
Tahun Anggaran _____			
Nama Mata Anggaran	:		
Nomor Mata Anggaran	:		
Aktivitas Yang Direncanakan	:		
		1	
		2	
Waktu Pelaksanaan	:		
Nilai Satuan	:		
Jumlah Anggaran**	:	Rp	
Rincian	:	; Peruntukan	Jumlah
		1	Rp.
		2	Rp.
		Jumlah	Rp.
Satuan Ukur Kegiatan	:		
		1	
		2	
		3	
Target Kinerja (Target Output) :			
		1	

Tabel 1.
Rencana Kerja
Anggaran
Pendapatan
Sekolah

Tabel 2.
Rencana Kerja
Anggaran
Belanja
Sekolah

		Jumlah	Rp. 350.000.000
Satuan Ukur Kegiatan	:		
	1	setiap bulan	
	2	satu tahun	
	3		
Target Kinerja (Target Output) :			
	1	Sesuai target 95 %	
	2		
Target Waktu Penyelesaian	:	tahun anggaran 2016/2017	
Tim Penyusun			
1. Sudiran SPd			
2. Warsinah SPd	Penanggung Jawab		
	Drs. Sutikno		

Peserta dilatih untuk membuat program yang disesuaikan dengan kapasitas siswa dengan menguraikan jenis program, besarnya biaya yang diperlukan, pengawasan/ control pelaksanaan dan ukuran output yang dihasilkan.

c. Form Anggaran Berbasis Kinerja dan Aset

Form penggalan dana pendapatan sekolah dan form penggalan program aktivitas terisi langkah selanjutnya mengisi form anggaran pendapatan dan belanja untuk masing-masing sekolah. Berikut form anggaran yang berbasis kinerja.

ANGGARAN BELANJA TAHUNAN SEKOLAH TAHUN ANGGARAN..... Nama Sekolah								
Kode	Kegiatan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Nilai Satuan	Jumlah Anggaran **	Satuan Ukur Kegiatan	Target Kinerja (Target Output)	Target Waktu
2.1	Belanja Pegawai							

27

	2.1.1	Gaji Guru/karyawan	Sutikno	bulan	-	250 Jt	waktu	terbayar	bulan
	2.1.2	Honor Guru dan karyawan	Sutikno	bulan	-	250 Jt	waktu	terbayar	bulan
	2.1.3	Honor Guru Ekstrakurikuler							
2.2	Belanja Pemeliharaan								
2.3	Belanja Barang								
2.4	Belanja Modal (pembangunan)								
2.5	Belanja Perjalanan Dinas								
2.6	Belanja Penunjang								
	2.6.1	kegiatan kurikulum							
	2.6.2	kegiatan kesiswaan							
	2.6.3	kegiatan Ismuba							
	2.6.4	kegiatan Humas							
	2.6.4	Kegiatan PSDM							
2.7	Belanja Basiswa Guru & siswa								
2.8	Belanja Sosial								

Janayu
1.1

Tabel 3.
Anggaran
Belanja
Tahunan
Sekolah

3.1	Belanja Persyarikatan							
4.1	Belanja pengembangan Sarana							
5.1	Belanja Tabungan Siswa							
	Jumlah							

Form anggaran belanja berbasis kinerja untuk aktivitas pendanaan yang harus dogali oleh para tim pembuat atau penyusun anggaran.

ANGGARAN PENDAPATAN PENDAPATAN TAHUNAN SEKOLAH TAHUN ANGGARAN..... Nama Sekolah								
Kode	Kegiatan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Nilai Satuan	Jumlah Anggaran	Satuan Ukuran Kegiatan	Target Kinerja (Target Output)	Target Waktu
1	Pendapatan							
1	Pendaftaran beserta didik baru							
1.1.1	Penjualan formulir							
1.1.2	Fortasi							
1.1.3	Fortawa							
	Jumlah							
2	DPP kelas							
1,2.1	Gelombang I							

	1.2.2	Gelombang II							
		Jumlah							
3	Uang sekolah (SPP)								
	1.3.1	SPP Kls....							
	1.3.2	SPP Kls....							
	1.3.3	SPP Kls....							
		Jumlah							
4	Uang Kegiatan Siswa (UKS)								
	1.4.1	SPP Kls....							
	1.4.2	SPP Kls....							
	1.4.3	SPP Kls....							
5	Uang Infaq Siswa								
	1.5.1.	SPP Kls....							
	1.5.2	SPP Kls....							
	1.5.3	SPP Kls....							
7	Lain-lain								
	1.7.1	Uang Pratikum/PKL							
	1.7.2	BOS							
	Total Rencana Anggaran								

Tabel 4.
Anggaran Pendapatan
Pendapatan Tahunan
Sekolah

SIMPULAN

Janayu

1.1

Berdasarkan pelatihan penyusunan Rencana kerja Anggaran Sekolah (RKAS) berbasis kinerja dapat disimpulkan Peserta palatihan penyusunan Rencana kerja Anggaran Sekolah (RKAS) berbasis kinerja sebanyak 50 Orang terdiri dari kepala sekolah dan bendaharawan sekolah sd dan SMP Muhammadiyah se wilayah Kab.Malang. Pelatihan yang

diberikan kepada para bendahara dan kepala sekolah meliputi Paradigma Perencanaan dan pengendalian Keuangan Sekolah serta Prosedur Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja. Keberhasilan pelatihan dapat dilihat hasil pretest rata-rata nilai 55 sementara post tes rata-rata 80.

Dari proses pelaksanaan pelatihan Rencana Kerja Anggaran Sekolah berbasis kinerja disarankan sebagai berikut :

1. Peserta pelatihan tidak hanya kepala sekolah dan bendaharan akan tetapi perlu diikuti ketua komite sekolah.
2. Alat peraga tidaknya form semata tetapi perlu ditambah dengan saran computer yang memadai. Perlu adan tambahan dana pengabdian dan selanjut perlu program pendamoingan pengelolaan aset sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 473-485.
- Coryanata, I. (2016). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. *Journal of Accounting and Investment*, 12(2), 110-125.
- Friska, I. Y. (2015). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 1(1).
- Halidayati, I. (2014). Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh). *Jurnal Akuntansi*, 2(2).
- Halim, A. (2015). *Pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit dengan anggaran waktu audit dan komitmen profesional sebagai variabel moderasi*. Universitas Brawijaya.
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1-15.
- Hifni, S., Sayudi, A., & Hayat, A. (2019). *Peran akuntansi keberlanjutan: Akuntabilitas dalam ekologi, sosio, dan ekonomik*. Paper presented at the Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah.
- Komariah, N. (2018). Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan. *Jurnal Al-Afkar*, 6(1).
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Kotamobagu Selatan kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, 8(1).
- Muhaimin, M. (2015). *Manajemen Pendidikan (Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah)*: Prenada Media.

- Nanda, R., & Darwanis, D. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif pada Dinas Dpkkd Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 327-340.
- Pratiwi, N. B., & Hanafi, R. (2016). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 5(1), 79-98.
- Rahmah, N. (2016). Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah. *KELOLA: Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 73-77.
- Saragih, J. (2012). Reformasi Aparatur Negara untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Benar (Good Governance). *Jurnal Ilmiah Widya*.
- Shafratunnisa, F. (2016). Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kepada stakeholders di sd islam binakheir.
- Utama, D. A., & Setiyani, R. (2014). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru. *Dinamika Pendidikan*, 9(2).
- Verasvera, F. A. (2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Maranatha*, 15(2).
- Yuliani, N. L., & Susanto, B. (2016). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik.